



REVITALISASI KARET ALAM BERKELANJUTAN DI INDONESIA

KEBIJAKAN, LEGALITAS, DAN KELEMBAGAAN
UNTUK AKSES PASAR GLOBAL



DAFTAR ISI

KARET INDONESIA DI TITIK BALIK SEJARAH	2
MENDIAGNOSIS MASALAH INTI: KRISIS TATA KELOLA DAN KOORDINASI	5
MEMBEDAH PERTARUHAN: DAMPAK EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN	9
REKOMENDASI ARAH STRATEGIS: EMPAT PILAR REVITALISASI SEKTOR KARET NASIONAL	13
KESIMPULAN: MENGUBAH KRISIS MENJADI PELUANG KARET ALAM INDONESIA DI PANGGUNG EKONOMI HIJAU GLOBAL	18

Penulis

Diah Suradiredja, Angga Prathama Putra, Eka Purnamasari, Adhitya Adhyaksa, Paskah Eri Perdana, Dinda Viola Awani, Rika Sri Wahyuni

Kontributor

Angga Eko Emzar, Langlang Tata Buana, Widyantoko Sumarlin, Gede Wibawa, Hartono Prabowo, Putra Agung, Erwin Tunas, Mohammad Zainuri Hasyim, Musdalifah, Rostanto Suprpto, Syachraini, Giza Feristya Sari, Thesis Budiarto, Indra Setia Dewi, Arie Soetjiadi, Ilahang

Desain dan Tata Letak

Heri

Diterbitkan oleh

Yayasan World Wildlife Fund Indonesia, 2026.

Any reproduction/reproduction of books in full or in part must state the title and credit of the publisher mentioned above as the copyright owner.

© 2026

Paper 100% recycled

WWF® and ©1986 Panda Symbol are owned by WWF. All rights reserved.

WWF-Indonesia, Gedung Graha Simatupang, Tower 2 Unit C 7th Floor, Jl. Letjen TB Simatupang Kav 38, Jakarta Selatan 12540

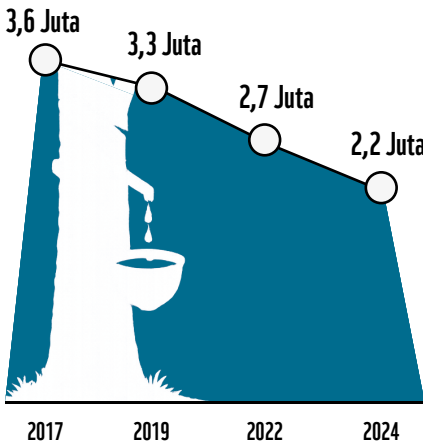
For contact details and further information, please visit our website at www.wwf.id

© WWF-Indonesia

KARET INDONESIA DI TITIK BALIK SEJARAH

Karet alam merupakan komoditas dengan peran historis dan ekonomi yang fundamental bagi Indonesia, menjadi sandaran hidup bagi sekitar 1,5 juta keluarga petani kecil¹ serta berfungsi sebagai penopang ekonomi daerah dan sumber devisa negara. Sebagai salah satu produsen utama karet dunia, Indonesia memiliki posisi strategis dalam rantai pasok global. Namun, di balik signifikansi tersebut, sektor karet nasional kini berada pada titik kritis yang mengindikasikan krisis struktural yang mendalam.

1 Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. 2024. Statistik Perkebunan 2023-2025 Jilid 1. Jakarta



Dalam kurun waktu kurang dari satu dekade, produksi karet nasional mengalami penurunan tajam hampir 40 persen, dari sekitar 3,6 juta ton pada 2017 menjadi sekitar 2,2 juta ton pada 2024². Penurunan ini tidak dapat dipandang sebagai fluktuasi siklus pasar semata, melainkan cerminan melemahnya kapasitas produksi dan tata kelola. Kondisi

2 Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. 2024. Statistik Perkebunan 2023-2025 Jilid 1. Jakarta

tersebut diperparah oleh kinerja ekspor yang melemah, terlihat dari penurunan volume ekspor sebesar 14,30 persen pada Januari 2024³ dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Krisis struktural ini kian diperumit oleh regulasi pasar global yang kian ketat, khususnya penerapan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR)⁴. Regulasi ini menuntut legalitas lahan, ketertelusuran hingga tingkat petak kebun, serta bukti bebas deforestasi; persyaratan yang belum dapat dipenuhi oleh mayoritas petani kecil Indonesia. Keterbatasan tersebut bukan disebabkan oleh rendahnya komitmen petani, melainkan oleh lemahnya sistem legalitas lahan, inkonsistensi data spasial dan statistik nasional, serta proses penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang birokratis dan tidak inklusif.

Pada saat yang sama, kapasitas kelembagaan sektor karet nasional mengalami kemunduran. Sekretariat Nasional Perkebunan Karet Berkelanjutan Indonesia/*Sustainable Natural Rubber Platform of Indonesia* (SNARPI) tidak aktif, koordinasi lintas aktor terfragmentasi, dan basis data sektoral tidak sinkron. Rantai pasok masih didominasi oleh tengkulak yang melemahkan insentif kualitas, sementara banyak Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) tidak berfungsi optimal. Kondisi ini kontras dengan perkembangan di negara pesaing utama seperti Thailand dan Vietnam, yang secara aktif memperkuat tata kelola dan mendorong hilirisasi industri karet mereka.

Di tengah tekanan dan ketertinggalan tersebut, terdapat peluang strategis bagi Indonesia untuk membalikkan arah dan memulihkan posisi sektor karet di pasar global. Peluang ini hanya dapat diwujudkan melalui reformasi menyeluruh dan terintegrasi yang mencakup perbaikan sistem legalitas dan ketertelusuran, penguatan pasar dan mutu bokar berbasis kelembagaan petani, percepatan hilirisasi menuju industri bernilai tambah tinggi, serta reaktivasi SNARPI sebagai pusat koordinasi nasional. Transformasi ini tidak hanya penting untuk menjaga daya saing ekspor, tetapi juga menjadi fondasi keberlanjutan ekonomi jutaan petani kecil dan posisi Indonesia dalam ekonomi hijau global.

Krisis yang dihadapi sektor karet saat ini menuntut respons kebijakan yang terstruktur, visioner, dan dapat diimplementasikan. Kegagalan merespons tantangan ini berisiko menggerus posisi strategis Indonesia di pasar global sekaligus mengancam keberlangsungan ekonomi jutaan rakyat yang bergantung pada komoditas ini.

Berdasarkan konteks tersebut, laporan kebijakan ini bertujuan untuk menganalisis akar permasalahan struktural yang melanda sektor karet nasional dan menyajikan kerangka kerja kebijakan yang komprehensif. Kerangka ini dirancang untuk mengembalikan daya saing sektor, memperkuat posisi petani kecil dalam rantai nilai, serta memastikan keberlanjutan karet alam sebagai salah satu pilar utama ekonomi hijau Indonesia di masa depan. Analisis selanjutnya akan diawali dengan diagnosis terhadap dua masalah inti yang menjadi fondasi dari keseluruhan tantangan yang dihadapi sektor karet Indonesia saat ini.

3 Pusat Data dan Sistem Informasi, Satu Data Perdagangan. 2024. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Diakses pada 7 November 2025 dari <https://satudata.kemendag.go.id/ringkasan/produk/realisasi-ekspor-karet-dan-produk-karet-periode-2019-2024-jan>

4 [EU Regulation on Deforestation-free Products](#)



Mendiagnosis Masalah Inti:

KRISIS TATA KELOLA DAN KOORDINASI

Berbagai tantangan yang terlihat di lapangan mulai dari produktivitas rendah, kesulitan ekspor, hingga dominasi tengkulak sejatinya merupakan gejala dari dua masalah inti: kevakuman kepemimpinan institusional dan krisis data nasional. Mengatasi kedua akar masalah ini adalah prasyarat fundamental untuk perbaikan lainnya, karena tanpa orkestrasi yang jelas dan fondasi data yang solid, setiap intervensi kebijakan akan bersifat sporadis dan tidak efektif.

A. Ketiadaan Arah Kebijakan Nasional

Salah satu sumber krisis terbesar adalah tidak adanya lembaga yang secara efektif mengoordinasikan arah kebijakan nasional untuk sektor karet. Berbeda dengan komoditas kelapa sawit yang didukung oleh kelembagaan kuat dan mekanisme pembiayaan yang jelas melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan-BPDP (dahulu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit-BPDPKS), karet justru secara sistematis terpinggirkan dari prioritas pembangunan nasional. Buktinya terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, di mana karet disebut secara terbatas. Lebih jauh, ketika ekspansi mandat BPDP diusulkan untuk komoditas lain seperti kakao dan kelapa, karet kembali absen dari daftar prioritas⁵. Ketiadaan “*policy champion*” ini menyebabkan kebijakan yang ada berjalan sektoral tanpa sinergi.

Kondisi ini semakin mengemuka dengan tidak aktifnya Sekretariat Nasional Perkebunan Karet Berkelanjutan Indonesia (SNARPI), yang seharusnya berfungsi sebagai platform koordinasi multipihak. Akibatnya, kebijakan karet berjalan terfragmentasi tanpa arah strategis nasional, Indonesia tidak memiliki suara terpadu dalam menghadapi dinamika global, serta kehilangan kapasitas untuk merumuskan standar keberlanjutan dan strategi industri yang koheren, sebuah kesenjangan kelembagaan yang semakin nyata jika dibandingkan dengan negara pesaing.

5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 tahun 2024

Tabel 1. Perbandingan tata kelola karet

Negara	Struktur Kelembagaan dan Kebijakan
Indonesia	Platform multipihak (SNARPI) tidak aktif. Kebijakan bersifat sporadis dan tidak terkoordinasi antar-kementerian. Tidak ada lembaga tunggal yang menjadi pemimpin agenda nasional.
Thailand	Tata kelola terpusat melalui <i>Rubber Authority of Thailand</i> (RAOT) yang mengintegrasikan seluruh rantai nilai. Didukung oleh kawasan industri terpadu seperti <i>Rubber City</i> untuk hilirisasi.
Vietnam	Kolaborasi erat antara pemerintah, <i>Vietnam Rubber Group</i> (VRG), dan <i>Vietnam Rubber Association</i> (VRA) untuk mendorong riset, produksi, dan ekspor produk bernilai tambah.
Malaysia	<i>Malaysia Rubber Board</i> (MRB) atau Lembaga Getah Malaysia (LGM) bertanggung jawab atas kebijakan dan pengembangan industri karet dari hulu hingga hilir, termasuk pengenaan cess ekspor karet alam, serta dukungan program pemberdayaan <i>smallholders</i> oleh RISDA (<i>Rubber Industry Smallholder Development Agency</i>) dalam <i>Ministry of Rural Development</i> .
Pantai Gading	Tata kelola sektor karet terkonsolidasi di bawah satu lembaga nasional melalui <i>Palm Oil and Rubber Council</i> (CHPH) dengan mandat luas, termasuk pengaturan harga, legalitas, dan regulasi pembangunan ekosistem industri pengolahan.

Kesenjangan kelembagaan ini secara langsung menyebabkan Indonesia tertinggal dalam persaingan global, bergerak tanpa arah yang jelas dalam lanskap perdagangan yang menuntut koordinasi dan strategi terpadu.

B. Penguatan Tata Kelola Data Nasional sebagai Pilar Kebijakan Publik

Fondasi kebijakan yang efektif bertumpu pada ketersediaan data yang akurat dan kredibel. Namun, sektor karet Indonesia saat ini menghadapi krisis data yang bersifat fundamental, ditandai oleh konflik tajam antara data spasial dan data statistik resmi. Ketimpangan ini terlihat jelas di Kalimantan, di mana analisis spasial berbasis citra satelit pada tahun 2020 yang dilakukan *Le Maire, et. al.* (2025) memperkirakan luas kebun karet mencapai 1,79 juta hektar⁶, sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode yang sama hanya mencatat sekitar 899 ribu hektar⁷. Inkonsistensi yang ekstrem ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berdampak langsung pada kualitas kebijakan publik dan daya saing sektor. Tanpa data luas lahan yang konsisten, perhitungan produktivitas riil per hektar menjadi tidak valid, sehingga menghambat perancangan program peremajaan, peningkatan hasil, maupun alokasi intervensi yang tepat sasaran. Pada saat yang sama, ketidakselarasan data melemahkan kemampuan Indonesia untuk memenuhi persyaratan ketertelusuran dan geolokasi yang diwajibkan oleh regulasi perdagangan hijau global seperti *EU Deforestation Regulation* (EUDR), sehingga meningkatkan risiko eksklusi pasar.

6 Le Maire, G., Gaveau, D., et al. 2025. *Mapping rubber monoculture and jungle rubber across Kalimantan using multisource satellite data*. *International Journal of Remote Sensing*, 46(19), 7019-7043. <https://doi.org/10.1080/01431161.2025.2545024>

7 Badan Pusat Statistik. 2020. *Statistik Karet Indonesia*

Lebih jauh, krisis data ini mencerminkan persoalan tata kelola institusional yang lebih dalam, khususnya ketiadaan otoritas data tunggal yang dimandatkan serta lemahnya kemauan politik untuk menyelaraskan kepentingan dan metodologi antar-sektor. Kondisi ini menempatkan daya saing karet alam Indonesia dalam tekanan ganda: di satu sisi, tuntutan kepatuhan regulasi global semakin ketat, sementara di sisi lain, fondasi tata kelola domestik yang mencakup sistem legalitas, data, kelembagaan, dan rantai pasok belum siap menjawab tantangan tersebut. Ketika tekanan eksternal meningkat di tengah tren penurunan ekspor yang berkelanjutan, ketiadaan pembenahan struktural pada kedua sisi ini memperbesar risiko kehilangan akses pasar.

Pada akhirnya, krisis tata kelola dan data ini bukan hanya persoalan administratif, melainkan menciptakan pertarungan ekonomi, sosial, dan ekologis yang signifikan bagi Indonesia.

Dampaknya menjalar dari melemahnya posisi tawar nasional di pasar global hingga terancamnya keberlanjutan penghidupan jutaan petani kecil, yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.



2

Membedah Pertaruhan:

DAMPAK EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN

Kegagalan dalam mengatasi krisis tata kelola telah menimbulkan dampak berantai yang signifikan, mengancam daya saing industri, akses pasar, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan petani. Bagian ini akan mengukur “harga” dari *status quo*, menyoroti konsekuensi nyata dari absennya kebijakan yang terintegrasi dan kepemimpinan yang kuat.

A. Erosi Daya Saing Industri dan Ketergantungan Impor

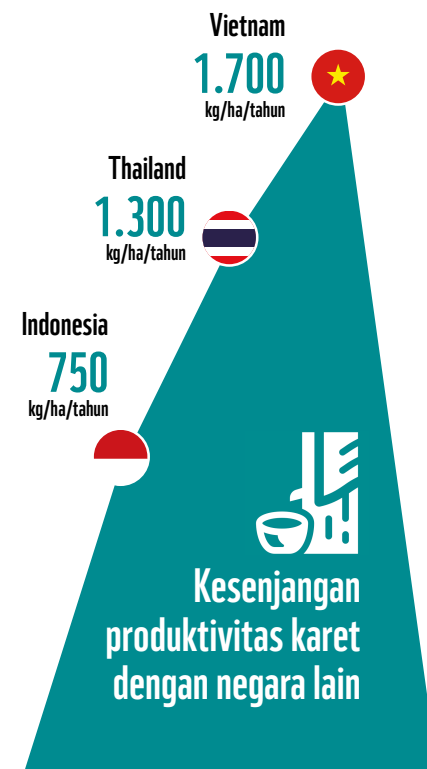
Penurunan produksi di sektor hulu telah merambat langsung ke sektor hilir dan melemahkan kapasitas industri pengolahan karet nasional. Kekurangan pasokan bahan baku memaksa banyak pabrik beroperasi di bawah kapasitas optimal, bahkan menghentikan operasinya. Dalam periode 2018–2024, jumlah pabrik *crumb rubber* yang aktif menurun drastis dari 152 menjadi 99 unit⁸, yang mencerminkan hilangnya 53 pabrik hanya dalam lima tahun dan menandai gejala deindustrialisasi yang serius di sektor karet.

Melemahnya industri pengolahan dalam negeri menciptakan paradoks struktural. Di tengah status Indonesia sebagai salah satu produsen karet terbesar dunia, penurunan produksi domestik justru mendorong peningkatan impor karet mentah untuk memenuhi kebutuhan industri yang tersisa. Volume impor karet alam meningkat dari 144.000 ton pada 2023 menjadi 150.000 ton pada 2024⁹. Pada saat yang sama, tekanan ekonomi di tingkat hulu mempercepat konversi kebun karet ke komoditas lain, terutama kelapa sawit, yang tidak hanya mengancam keberlanjutan pasokan bahan baku tetapi juga menggerus ekosistem agroforestri karet yang memiliki nilai ekologis tinggi.

8 Damiana. 2024. Satu per Satu Pabrik Karet RI Tutup, Kini Tinggal 104 Perusahaan. Diakses pada 4 November 2025, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240124140143-4-508627/satu-per-satu-pabrik-karet-ri-tutup-kini-tinggal-104-perusahaan> Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 2024. Analisis Kinerja Perdagangan Karet. Kementerian Pertanian

9 Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. 2024. Statistik Perkebunan 2023–2025 Jilid 1. Jakarta

Situasi ini diperparah oleh kesenjangan produktivitas yang tajam dengan negara pesaing¹⁰:



Meskipun data produktivitas resmi menjadi pijakan penting dalam perumusan kebijakan, lemahnya integrasi dengan data spasial mengenai luas kebun berpotensi menurunkan estimasi produktivitas riil. Kondisi ini menegaskan urgensi penguatan sistem data sebagai prasyarat untuk meningkatkan daya saing, menahan laju deindustrialisasi, dan mengamankan masa depan industri karet nasional.

10 FAO. 2025. Diakses pada 4 November 2025, dari <https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL>

B. Tekanan pada Petani dan Lanskap Agroforestri

Di tingkat tapak, petani menanggung beban ekonomi paling berat dari krisis sektor karet. Harga bahan olahan karet (bokar) yang sangat rendah seperti contohnya di Kapuas Hulu yang hanya berkisar Rp6.000–Rp7.000 per kilogram¹¹, tidak mampu menutup biaya hidup maupun perawatan kebun. Struktur rantai pasok yang panjang dan didominasi tengkulak memotong nilai jual yang diterima petani hingga 20–40%¹². sekaligus menghilangkan insentif peningkatan mutu akibat praktik pencampuran bokar berkualitas tinggi dan rendah. Namun, dalam ekosistem saat ini, tengkulak kerap menjadi satu-satunya sumber modal cepat dan akses pasar bagi petani, sehingga menciptakan hubungan ketergantungan (*captive relationship*) yang sulit diputus tanpa alternatif kelembagaan yang kuat.

Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya kelembagaan petani dan sistem legalitas yang belum berfungsi sebagai pengungkit. Sebagian besar Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) tidak aktif, meskipun keberhasilan di Musi Banyuasin, Kapuas Hulu, dan Simpang Dua menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan mampu memperbaiki posisi tawar dan mutu produksi.

Tekanan ekonomi yang berkelanjutan mendorong konversi kebun karet ke komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan, terutama kelapa

11 GIZ, GRASS. 2023. Studi Baseline Proyek GRASS di Kabupaten Kapuas Hulu. Jakarta

12 Satya Bumi. 2024. Maintaining the Elasticity of Indonesian Rubber: A National Strategy to Face the EUDR

sawit. Fenomena ini tidak hanya terjadi di tingkat petani, tetapi juga dilakukan oleh perusahaan perkebunan negara seperti PTPN III di Sumatera Selatan¹³. Konversi tersebut membawa dampak ekologis yang signifikan, termasuk hilangnya ekosistem agroforestri unik seperti *jungle rubber* yang memiliki nilai tinggi bagi keanekaragaman hayati dan penyimpanan karbon, khususnya di lanskap bernilai konservasi tinggi seperti Bukit Tigapuluh, Jambi.

Dalam konteks agroforestri, khususnya *jungle rubber*, memiliki peluang yang signifikan untuk dikembangkan dalam skema pasar karbon. Pengalaman proyek karet berbasis masyarakat di Sri Lanka menunjukkan bahwa kebun karet sebagai bagian dari sektor AFOLU mampu memenuhi prinsip dalam skema pasar karbon¹⁴. Dengan karakter struktur vegetasi multistrata menyerupai hutan sekunder dan kaitannya dengan lanskap bernilai konservasi tinggi, agroforestri karet memiliki potensi strategis dalam kontribusi target mitigasi perubahan iklim serta ko-benefit penting berupa perlindungan keanekaragaman hayati dan alternatif instrumen insentif ekonomi bagi petani.

Rangkaian dampak ekonomi, kelembagaan, dan ekologis ini bersifat sistemik dan saling terkait, menegaskan bahwa krisis sektor karet tidak dapat diselesaikan melalui intervensi parsial. Kondisi ini menuntut adanya cetak biru transformasi yang terintegrasi untuk membalikkan tren penurunan, memulihkan kesejahteraan petani, dan menjaga keberlanjutan ekosistem karet alam Indonesia.

13 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250311123741-92-1207450/ptpn-iii-bakal-tambah-59-ribu-ha-kebun-sawit-hingga-2029>

14 International Rubber Conference. 2024. *Carbon trading with community-based rubber cultivation*; lessons learnt from Sri Lanka

C. Risiko Akses Pasar di Era Perdagangan Hijau

Perubahan rezim perdagangan global menuju standar keberlanjutan yang semakin ketat menimbulkan risiko serius terhadap akses pasar karet alam Indonesia. Penerapan *EU Deforestation Regulation* (EUDR) mensyaratkan bukti legalitas lahan, ketertelusuran hingga tingkat petak kebun, serta data geolokasi yang akurat bagi setiap produk yang memasuki pasar Uni Eropa. Risiko ini sangat signifikan bagi Indonesia karena sekitar 85 persen produksi karet nasional berasal dari petani kecil, yang sebagian besar belum memiliki dokumen legalitas lahan formal seperti sertifikat hak milik atau Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).

Kerentanan tersebut semakin besar bagi petani yang kebunnya berada di dalam atau berbatasan dengan kawasan hutan negara. Dalam kerangka hukum yang berlaku saat ini, lahan tersebut secara otomatis tidak memenuhi syarat untuk memperoleh STDB, sehingga pemenuhan legalitas menjadi tidak mungkin dilakukan. Situasi ini diperumit oleh perbedaan mendasar dalam definisi “hutan” antara Indonesia dan Uni Eropa. Definisi hutan dalam EUDR hanya berbasis tutupan lahan dan mengabaikan agroforestri yang dikelola oleh petani, tidak selaras dengan realitas bentang alam Indonesia yang didominasi sistem kebun campur¹⁵.

Akibatnya, kebun agroforestri rakyat yang lestari seperti *jungle rubber* berisiko salah diklasifikasikan sebagai hutan oleh sistem pemantauan Uni Eropa, dan setiap perubahan tutupan vegetasi di dalamnya dapat dinilai sebagai deforestasi, meskipun legal dan bernilai ekologis menurut hukum nasional.

Dalam konteks EUDR, terdapat tiga hambatan utama yang secara langsung membatasi partisipasi petani kecil Indonesia dalam rantai pasok global. Pertama, lemahnya legalitas lahan menjadi titik kritis karena ketiadaan dokumen formal membuat produk berisiko dikategorikan tidak patuh. Kedua, konflik definisi hutan menciptakan risiko misklasifikasi yang tinggi terhadap kebun agroforestri, sehingga aktivitas budidaya yang sah dapat dipersepsikan sebagai deforestasi. Ketiga, tuntutan ketertelusuran menghadapi hambatan serius akibat krisis data nasional, tercermin dari disparitas tajam antara data spasial dan data statistik yang melemahkan kredibilitas *due diligence* Indonesia di mata pasar global.

Ketidakmampuan memenuhi persyaratan tersebut membawa konsekuensi ekonomi dan reputasi yang signifikan, mulai dari risiko penolakan produk di pelabuhan tujuan, hilangnya kepercayaan pembeli internasional, hingga tertutupnya akses ke pasar premium.

Bahkan pelaku usaha yang telah berinvestasi dalam sertifikasi keberlanjutan seperti *Forest Stewardship Council* (FSC) tetap berisiko kehilangan akses pasar apabila persoalan legalitas dan ketertelusuran dasar tidak diselesaikan. Ketidaksiapan menghadapi tekanan global ini pada akhirnya berakar pada lemahnya fondasi tata kelola domestik sektor karet.



Rekomendasi Arah Strategis:

EMPAT PILAR REVITALISASI SEKTOR KARET NASIONAL

¹⁵ van Noordwijk, M., Dewi, S., et al. 2025. *Beyond imperfect maps: Evidence for EUDR-compliant agroforestry*. *People and Nature*, 7, 1713–1723. <https://doi.org/10.1002/pan3.70088>

Meskipun tantangannya besar, Indonesia memiliki aset dan peluang unik untuk merevitalisasi sektor karetnya, mengubah krisis menjadi keunggulan kompetitif dalam skala global. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sebuah transformasi yang bertumpu pada pilar-pilar strategis yang saling memperkuat, mulai dari level kebijakan nasional hingga pemberdayaan di tingkat tapak.

Tabel 2. Kerangka Implementasi Kebijakan

Jangka Pendek (1-2 tahun)	Reaktivasi SNARPI melalui konsolidasi lintas Kementerian/ Lembaga Reformasi proses STDB: sinkronisasi antar-pemangku kepentingan dan inklusivitas Harmonisasi data BPS - ATR/ BPN - Kemenhut
Jangka Menengah (3-5 tahun)	Replikasi UPPB-pasar lelang berbasis kualitas Insentif konsumsi domestik karet alam Penetapan koridor rantai pasok karet berkelanjutan
Jangka Panjang (>5 tahun)	Reformasi tata ruang berbasis zonasi komoditas

Pilar 1: Reformasi Tata Kelola Legalitas dan Data

Krisis legalitas lahan dan fragmentasi data nasional merupakan hambatan paling mendesak dalam upaya membangun rantai pasok karet yang patuh regulasi global dan berkelanjutan. Tanpa penyelesaian kedua isu ini, petani kecil berisiko terus tereksklusi dari pasar formal, sementara negara kehilangan fondasi data yang kredibel untuk pengambilan keputusan dan pembelaan kepentingan nasional di forum internasional. Oleh karena itu, intervensi kebijakan harus difokuskan pada dua langkah prioritas yang saling terkait.

a. Skema Pengakuan Legalitas yang Inklusif bagi Petani Kecil

Langkah pertama adalah merancang skema pengakuan legalitas afirmatif bagi petani yang kebunnya berada di dalam atau berbatasan dengan kawasan hutan. Skema ini dapat diwujudkan melalui perhutanan sosial atau mekanisme pengakuan agroforestri kolektif, dengan tujuan utama mengintegrasikan petani tersebut ke dalam rantai pasok legal tanpa menunggu proses sertifikasi hak atas tanah yang panjang dan mahal. Sejalan dengan itu, proses penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) perlu direformasi agar lebih sinkron antar-pemangku kepentingan, baik sebagai perumus kebijakan maupun unit pelaksana teknis. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah keterbatasan anggaran unit pelaksana dalam melakukan pemetaan dan verifikasi data STDB. Reformasi ini perlu diarahkan agar lebih inklusif, mempercepat proses penerbitan, serta dapat diakses oleh seluruh petani kecil sebagai prasyarat dasar ketertelusuran dan kepatuhan pasar.

b. Sistem Data Nasional Terintegrasi sebagai Fondasi Ketertelusuran

Langkah kedua adalah membangun sistem data nasional terintegrasi yang berfungsi sebagai *single source of truth* bagi sektor karet. Sistem ini harus mampu menyinkronkan data spasial yang mencakup luas dan lokasi kebun dengan data statistik yang mencakup produksi dan produktivitas. Integrasi ini menjadi fondasi untuk memenuhi persyaratan ketertelusuran global secara kredibel, memperkuat kepercayaan pasar, serta menyediakan basis data yang konsisten bagi perumusan kebijakan, pemantauan keberlanjutan, dan mitigasi risiko ketidakpatuhan di tingkat nasional.

c. Zonasi Berbasis Kesesuaian Lahan

Sebagai strategi jangka panjang, pendekatan zonasi komoditas berbasis kesesuaian lahan, sebagaimana diterapkan di Kanada, Eropa, Amerika Serikat, dan Malaysia relevan untuk diadopsi. Sistem ini menetapkan zona produksi ekonomi spesifik berdasarkan karakteristik biofisik dan fungsi ekologis, sehingga dapat mengurangi konflik tata guna lahan, meningkatkan kepastian investasi, serta menjaga stabilitas fungsi ekonomi dan ekologis lanskap.

Pilar 2: Penguatan Kelembagaan Petani dan Efisiensi Rantai Pasok

Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani merupakan kunci utama untuk meningkatkan kualitas bokar, efisiensi rantai pasok, serta posisi tawar petani karet alam. Struktur rantai pasok yang saat ini didominasi oleh tengkulak telah menciptakan siklus kualitas rendah dan harga yang tidak adil, karena tidak adanya insentif yang membedakan antara bokar berkualitas baik dan buruk. Oleh karena itu, intervensi strategis perlu difokuskan pada penguatan model kelembagaan kolektif petani yang telah terbukti berhasil.

a. Replikasi dan Skala Model Kelembagaan yang Terbukti Efektif

Fokus strategis pemberdayaan petani diarahkan pada replikasi dan penskalaan model Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) yang sukses, terutama yang terintegrasi dengan sistem pasar lelang dan memiliki *Internal Control System* (ICS). Model ini terbukti mampu meningkatkan posisi tawar petani melalui pemasaran kolektif, transparansi harga, dan pengendalian mutu tingkat kelompok. Untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan dampak, replikasi model ini memerlukan dukungan kebijakan daerah yang kuat serta alokasi pendanaan pemerintah daerah yang terstruktur dan konsisten.

Sejumlah praktik baik menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan petani dapat menghasilkan dampak nyata. Di Musi Banyuasin, keberhasilan UPPB dan pasar lelang yang didukung penuh oleh regulasi daerah terbukti meningkatkan pendapatan petani secara signifikan. Di Kapuas Hulu, penerapan *Internal Control System* oleh *Barese Rubber Center* berhasil meningkatkan mutu bokar hingga memenuhi standar SNI, membuka akses pasar yang lebih baik. Selain itu di Simpang Dua Kalimantan Barat, transformasi UPPB menjadi koperasi memungkinkan pemasaran kolektif dan penjualan langsung ke *end-buyer*, sehingga memotong mata rantai perantara dan meningkatkan nilai yang diterima petani.

b. Insentif Pasar sebagai Kunci Peningkatan Kualitas Bokar

Untuk mendorong replikasi nasional dari model-model keberhasilan tersebut, diperlukan skema insentif harga yang jelas dan konsisten bagi bokar

bersih. Penciptaan insentif pasar untuk bokar berkualitas merupakan elemen krusial dalam memutus dominasi tengkulak, sekaligus sebagai pendorong transformasi kelembagaan petani menuju sistem produksi dan pemasaran karet yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Dukungan terhadap sistem pasar lelang yang transparan, dikombinasikan dengan penerapan ICS di tingkat kelompok tani, akan menciptakan mekanisme harga yang adil dan berbasis kualitas. Dengan adanya diferensiasi harga yang jelas untuk “bokar bersih”, petani memiliki insentif langsung untuk meningkatkan praktik pascapanen, sementara rantai pasok menjadi lebih efisien dan dapat dilacak.

Pilar 3: Reaktivasi Platform Orkestrasi Nasional melalui SNARPI

Vakumnya koordinasi lintas sektor dan lintas aktor dalam tata kelola karet alam menunjukkan kebutuhan mendesak akan kepemimpinan nasional yang kuat dan terlegitimasi. Tanpa satu entitas pengarah, kebijakan karet berjalan terfragmentasi, data terpecah, dan respons terhadap tekanan

regulasi global menjadi tidak terkoordinasi. Oleh karena itu, penguatan kepemimpinan nasional menjadi prasyarat utama untuk membangun tata kelola karet yang efektif dan berkelanjutan.

Reaktivasi Sekretariat Nasional Perkebunan Karet Berkelanjutan Indonesia (SNARPI) diposisikan sebagai solusi kunci untuk mengisi kekosongan koordinasi tersebut. SNARPI perlu diaktifkan kembali sebagai platform multipihak yang berfungsi sebagai pusat orkestrasi kebijakan karet nasional, dengan mandat yang jelas, struktur operasional yang fungsional, serta dukungan politik dan pendanaan yang memadai. Dalam perannya sebagai pusat orkestrasi, SNARPI harus menjalankan fungsi strategis yang terintegrasi, meliputi:

- Memimpin penyusunan standar keberlanjutan karet nasional yang kredibel dan diakui secara global, sehingga dapat menjadi rujukan bersama bagi pemerintah, pelaku usaha, dan petani.
- Mengonsolidasikan dan menyelaraskan data karet dari berbagai sumber baik statistik, spasial, maupun administratif untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.
- Representasi resmi posisi Indonesia dalam dialog dan negosiasi perdagangan internasional, khususnya terkait isu keberlanjutan, deforestasi, dan ketertelusuran rantai pasok.

Dengan mandat dan fungsi tersebut, SNARPI diharapkan mampu mengakhiri fragmentasi kebijakan, memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global, serta menciptakan kerangka tata kelola karet alam yang koheren, adaptif terhadap regulasi internasional, dan berpihak pada keberlanjutan serta kepentingan petani kecil

Pilar 4: Kebijakan Peningkatan Konsumsi Karet Alam Domestik

Keberlanjutan sektor karet alam tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi dan kepatuhan terhadap standar global, tetapi juga oleh kemampuan membangun permintaan domestik yang kuat dan stabil. Selama ini, struktur pasar karet alam Indonesia sangat bergantung pada ekspor bahan mentah, sehingga pembentukan harga domestik domestik menjadi sangat rentan terhadap dinamika bursa internasional, terutama Singapura dan China. Peningkatan konsumsi karet alam dalam negeri menjadi instrumen strategis untuk menyeimbangkan struktur pasar, memperkuat stabilitas harga, dan meningkatkan ketahanan sektor secara jangka panjang.

a. Strategi Pemanfaatan Barang Jadi Karet Asal Domestik

Kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan konsumsi domestik melalui penciptaan skema insentif bagi industri manufaktur yang mendorong diversifikasi dan daya saing industri nasional. Insentif dapat memprioritaskan pada industri yang mengembangkan atau menyesuaikan lini produksinya agar mampu memanfaatkan karet alam domestik lebih optimal dan kompetitif, mencakup industri ban untuk kendaraan listrik (*EV tires*), alat kesehatan, serta berbagai komponen elastomer lainnya hingga komponen infrastruktur. Sektor-sektor ini menawarkan nilai tambah ekonomi yang signifikan, potensi penciptaan lapangan kerja

berkualitas, dan memperluas basis permintaan karet alam yang lebih stabil dan berjangka panjang. Pemanfaatan produk berbasis karet alam, seperti aspal karet, bantalan jembatan, dan komponen elastomer untuk infrastruktur transportasi dan pelabuhan, sepenuhnya berada dalam domain kebijakan pemerintah. Dengan menjadikan penggunaan produk berbasis karet alam sebagai bagian dari standar teknis dan spesifikasi proyek publik, pemerintah dapat berfungsi sebagai jangkar permintaan domestik yang mampu memberikan sinyal pasar yang kuat dan konsisten bagi industri dan petani.

b. Strategi Penciptaan Koridor Industri Karet Hijau

Upaya memperkuat daya saing nasional di tengah ketatnya standar keberlanjutan global, peningkatan konsumsi domestik perlu diintegrasikan dengan penciptaan Koridor Industri Karet Hijau. Pendekatan ini menghubungkan wilayah produksi karet berbasis agroforestri dan hutan rakyat dengan sentra pengolahan dan manufaktur dalam satu rantai pasok yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan tertelusur. Berbeda dengan kawasan industri konvensional, koridor memungkinkan integrasi wilayah produksi yang tersebar melalui standar keberlanjutan yang seragam, meliputi legalitas lahan, ketertelusuran, dan perlindungan fungsi ekologis lanskap, sehingga agroforestri rakyat diposisikan sebagai bagian integral dari daya saing sektor karet alam Indonesia.

Fondasi kebijakan pendekatan ini telah tersedia melalui inisiatif *Rubber Cities* antara Indonesia–Malaysia–Thailand dan penetapan KEK Sei Mangke sebagai *rubber city*. Namun, hingga kini belum dilengkapi standar keberlanjutan serta pemetaan jalur rantai pasok yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Implementasi penuh EUDR pada 2027 membuka peluang percepatan kebijakan dengan menetapkan persyaratan keberlanjutan yang jelas dan mengidentifikasi wilayah produksi yang patuh regulasi.

Kesimpulan:

MENGUBAH KRISIS MENJADI PELUANG KARET ALAM INDONESIA DI PANGGUNG EKONOMI HIJAU GLOBAL

Sektor karet alam Indonesia saat ini menghadapi tantangan struktural yang mendalam, terutama yang berakar pada lemahnya tata kelola kelembagaan dan krisis data nasional.

Namun, di balik tekanan tersebut, terbuka peluang strategis untuk melakukan transformasi fundamental. Empat pilar revitalisasi yang telah diidentifikasi penguatan orkestrasi nasional melalui SNARPI, pembangunan sistem data dan legalitas lahan yang terpadu, pemberdayaan petani di tingkat tapak, serta penguatan komitmen kebijakan dan regulasi pemerintah Indonesia

menyediakan kerangka yang jelas untuk mengubah kelemahan struktural menjadi kekuatan kompetitif jangka panjang bagi komoditas karet alam di Indonesia.

Kedepan, misi Indonesia tidak cukup berhenti pada pemulihan posisi sebagai salah satu produsen utama dunia, tetapi harus diarahkan untuk menjadi pemimpin global dalam penyediaan karet alam berkelanjutan yang dapat ditelusuri dan bebas deforestasi. Arah ini sejalan dengan transisi global sektor karet alam yang didorong oleh inisiatif seperti *Global Platform for Sustainable Natural Rubber* (GPSNR), meningkatnya tekanan investor berbasis kriteria Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG), serta berkembangnya kerangka *Taskforce on Nature-related Financial Disclosures* (TNFD). Transisi ini membuka peluang akses ke pasar bernilai tinggi,

termasuk ban kendaraan listrik dan produk medis, yang menuntut bahan baku ramah lingkungan dengan rantai pasok yang transparan dan kredibel.

Revitalisasi sektor karet dengan demikian merupakan investasi strategis bagi kedaulatan ekonomi nasional, peningkatan kesejahteraan sekitar 1,5 juta keluarga petani kecil, dan penguatan peran Indonesia dalam ekonomi hijau global.

Dengan langkah kebijakan yang terarah dan kemauan politik yang kuat, titik balik sejarah ini dapat menjadi awal dari era baru bagi karet alam Indonesia yang lebih berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.



© WWF-Myanmar



Working to sustain the natural world for the benefit of people and wildlife.

together possible™

panda.org

© 2026
Paper 100% recycled

WWF® and ©1986 Panda Symbol are owned by WWF. All rights reserved.

WWF-Indonesia, Gedung Graha Simatupang, Tower 2 Unit C 7th Floor,
Jl. Letjen TB Simatupang Kav 38, Jakarta Selatan 12540

For contact details and further information, please visit our website at www.wwf.id